

ABSTRAK

KONSTITUSIONALITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN (STUDI ANALISA NILAI-NILAI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM KONSTITUSI INDONESIA)

Kausar Rahmat

422021211079

Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan bagi penghayat kepercayaan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun hak-hak mereka diakui dalam konstitusi dan diperkuat oleh Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, masih ada berbagai kendala yang dihadapi, terutama dalam bidang administrasi, pendidikan, dan hak sipil. Selain itu, penerapan kebijakan publik terkait hal ini juga mengalami banyak hambatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menelusuri nilai-nilai yang diakui dalam konstitusi Indonesia, sehingga penghayat kepercayaan tetap dapat eksis dalam kerangka kewarganegaraan meskipun di tengah berbagai tantangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai penghayat kepercayaan dalam konteks konstitusi Indonesia dengan menggunakan teori kebebasan beragama (*religious freedom*).

Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data seperti buku, jurnal, artikel, manuskrip, berita, serta dokumen negara yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penghayat kepercayaan memiliki kedudukan konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, terutama dalam hal kebebasan beragama dan berkepercayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 serta berbagai regulasi turunannya telah memperkuat pengakuan atas hak-hak sipil mereka, termasuk pencantuman identitas kepercayaan dalam dokumen kependudukan, akses pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, penghayat kepercayaan berperan dalam menjaga nilai spiritual, hak asasi manusia, serta kearifan lokal yang selaras dengan prinsip Pancasila. Meski masih menghadapi tantangan implementasi dan resistensi birokrasi, pemerintah terus berupaya memastikan hak warga negara bagi penghayat kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Penghayat Kepercayaan serta integrasinya ke dalam sistem hukum negara. Langkah ini akan membantu memahami dengan lebih mendalam mengenai alasan-alasan dan konsekuensi dari kehadiran sistem kepercayaan dalam konteks konstitusi secara lebih komprehensif.

Kata kunci: Penghayat kepercayaan, Nilai-nilai, Konstitusi

ABSTRACT

CONSTITUTIONALITY OF ADHERENTS OF LOCAL RELIGIONS (AN ANALYTICAL STUDY OF ADHERENTS OF LOCAL RELIGIONS VALUES IN THE INDONESIAN CONSTITUTION)

Kausar Rahmat

422021211079

Indonesia guarantees freedom of religion and belief for adherents of local religions by Pancasila and the 1945 Constitution. Although their rights are recognized in the constitution and reinforced by Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016, there are still various obstacles faced, especially in the fields of administration, education, and civil rights. Moreover, the implementation of public policies related to this issue also faces many obstacles. Therefore, concrete steps are needed to trace the values recognized in the Indonesian constitution, so that adherents of local religions can continue to exist within the framework of citizenship despite various challenges.

This research aims to analyze the values of adherents of local religions in the context of the Indonesian constitution using the theory of religious freedom.

The research method is a literature study, with a descriptive qualitative analysis approach. By collecting and analyzing data such as books, journals, articles, manuscripts, news, and state documents relevant to this research.

The results of this study explain that Adherents of local religion have a constitutional position guaranteed by the 1945 Constitution, especially in terms of freedom of religion and belief. The Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 and its various derivative regulations have strengthened the recognition of their civil rights, including the inclusion of belief identities in population documents, access to education, and public services. In addition, Adherents of local religion play a role in preserving spiritual values, human rights, and local wisdom that align with the principles of Pancasila. Although still facing implementation challenges and bureaucratic resistance, the government continues to strive to ensure the rights of citizens for Adherents of local religion in national and state life.

This research has some limitations, therefore it is necessary to conduct further studies on the values contained in Penghayat Kepercayaan and its integration into the state legal system. This step will help to understand more deeply the reasons and consequences of the presence of the belief system in the context of the Constitution more comprehensively.

Keywords: Adherents of local religions, Values, Constitution